

TINJAUAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI PROPINSI SULAWESI UTARA

Sarful M Duwila¹, Josep B, Kalangi², George M.V kawung³

^{1,2,3}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115 Indonesia

Email : Syarfuld@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan perekonomian Propinsi Sulawesi utara yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pengalokasian anggaran belanja modal di Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2015. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif diperoleh dari data sekunder yang didapatkan dari badan pusat statistik provinsi Sulawesi utara. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi internet dan studi dokumentasi laporan keuangan daerah yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan keuangan Daerah Kementrian Keuangan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 10,86% dan terendah pada tahun 2003 yaitu 3,19%. Pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 1.012,945,961,000 dan terendah terjadi pada tahun 2003 119.631,244,000. Dana alokasi umum tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.026,948,809,000 dan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 242.328,520,000. Untuk pengalokasian anggaran belanja modal tertinggi pada tahun 2015 sebesar 757.272,145,000 dan terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 17.492,887,000

Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal

ABSTRACT

Regional economic development is a process whereby local governments and all components of the community manage various existing resources and form a partnership pattern to create a new job and stimulate the development of economic activity in the area. This research aims to know economic development of the province of North Sulawesi economic growth, local revenues, general allocation funds and the allocation of capital expenditures in North Sulawesi Province in 2003-2015. Data analysis method used in this research is descriptive analysis obtained from secondary data obtained from statistical center of North Sulawesi province. The method used is the method of data collection through interviews, internet observation and documentation study of local financial statements obtained from the website of the Directorate General of Regional Financial Balance of the Ministry of Finance. The results showed that the highest economic growth occurred in 2008 of 10.86% and the lowest on year 2003 that is 3.19%. Highest original revenues occurred in 2015 of 1,012,945,961,000 and the lowest was in 2003 119,631,244,000. The highest general allocation fund occurred in 2015 of 1,026,948,809,000 and the lowest occurred in 2003 amounted to 242,328,520,000. For the highest capital expenditure allocation in 2015 amounted to 757,272,145,000 and the lowest occurred in 2003 amounted to 17,492,887,000

Keywords : Economic Growth, Local Original Income, Funds General Allocation and Capital Expenditure

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental, hal tersebut ditujukan guna meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Sebagai upaya memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Mudrajad 2004) dalam setiyawati & Hamza (2007).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya.

Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi yang tingkat pertumbuhannya selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sulawesi Utara, jumlah PDRB Sulawesi Utara selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat kita lihat dalam tabel 1.1

Tabel 1.1.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara
Tahun 2003 – 2015 (%)

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2003	3.19
2004	4.26
2005	5.35
2006	5.72
2007	6.47
2008	10.86
2009	7.85
2010	7.16
2011	7.39
2012	7.86
2013	7.45
2014	6.31
2015	6.12

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov Sulawesi Utara (data diolah 2017)

Sejalan dengan perlambatan perekonomian global dan nasional, perekonomian Sulawesi utara pada tahun 2015 ditutup melambat 6.12 berdasarkan tabel di atas hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi utara masih cukup kuat dan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir perekonomian Sulawesi utara juga mencatat angka pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan nasional. Rata-rata pertumbuhan Sulawesi Utara sebesar 6,02%

Sejak pemberlakuan Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, diharapkan bisa memotivasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi Anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah..

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi utara selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara dapat dilihat dalam tabel 1.2

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara
Tahun 2003 – 2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu)
2003	119.631,244,000
2004	147.626.000.000
2005	198.270,258,000
2006	211.236,498,000
2007	252.324,235,000
2008	322.580,793,000
2009	311.083.688,000
2010	350.031,335,000
2011	535.087,975,000
2012	633.650,533,000
2013	789.631,755,000
2014	944.590,000,000
2015	1.012,945,961,000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan, data diolah

2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Utara tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 1.012,945,961,000 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 119.631,244.000 hal ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi

Sulawesi Utara sudah cukup baik dan mandiri yang berdampak pada meningkatnya peran Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan dalam mendukung pembangunan daerah

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah dana alokasi umum yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 tahun 2004)

Upaya peningkatan kapasitas perekonomian Sulawesi Utara masih belum terlepas dari dukungan pemerintah pusat dalam bentuk transfer dana. Transfer dana dimaksud berupa dana perimbangan yaitu dana alokasi umum. Berikut ini adalah data mengenai perkembangan dana alokasi umum Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2015

Tabel 1.3.
Perkembangan Dana Alokasi Umum Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2015

Tahun	Dana alokasi umum (Ribu)
2003	242.328,520.00
2004	220.626,000.00
2005	247.873,000.00
2006	404.324,000.00
2007	447.094,538.00
2008	532.916,167.00
2009	558.634,931.00
2010	558.634,930.00
2011	619.711,007.00
2012	790.534,491.00
2013	885.684,277.00
2014	949.852,622.00
2015	1,026,948,809.00

Sumber :Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan,data diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas total anggaran yang ditransfer dari pusat yaitu dana alokasi umum pemerintah pusat di Sulawesi Utara dari tahun 2003-2015 mengalami kenaikan setiap tahun anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 1.026,948,809,00. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas daerah serta mengurangi kesenjangan pelayanan kepada publik. Namun disisi lain, ketergantungan suatu daerah terhadap pendanaan dari pusat pada dasarnya masih terjadi diseluruh di seluruh Indonesia.

Bentuk pengeluaran pemerintah berupa alokasi anggaran belanja modal untuk penyediaan berbagai sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi aset tetap daerah dan

mempunyai nilai manfaat lebih satu tahun diharapkan dapat menjadi modal penunjang terlaksananya berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Perkembangan keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan dukungan fiskal daerah terhadap perekonomian. Berikut ini adalah data mengenai Anggaran belanja modal Sulawesi utara tahun 2003-2015 berdasarkan perhitungan APBD tahun 2003-2015

Tabel 1.4.
Anggaran Belanja Modal Propinsi Sulawesi Utara
Tahun 2003-2015

Tahun	Belanja Modal (Ribu)
2003	17.492,887,000
2004	22.167.419.000
2005	82.653,419,000
2006	112.059,712,000
2007	138.200,203,000
2008	157.341,663,000
2009	241.283,650,000
2010	207.920,864,000
2011	233.630,333,000
2012	387.596,718,000
2013	387.136,385,000
2014	509.774.433,000
2015	757,277,145,000

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, data diolah 2017

Berdasarkan tabel di atas Anggaran Belanja Modal Propinsi Sulawesi Utara tahun 2015 meningkat sebesar 757,277,145,000 dan terendah terjadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun kenaikan masih rendah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan operasional pemerintah dibandingkan untuk pembangunan fisik

Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan pertumbuhan perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi meningkat dari satu periode berikutnya, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya yang berarti bahwa produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat

Terdapat tiga pendekatan umum yang dapat digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB, yaitu

1. Pendekatan produksi
2. Pendekatan pendapatan
3. Pendekatan pengeluaran

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Daerah sesuai UU No.22 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim 2007). Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa 1995 dalam Damang 2011)

Dana Alokasi Umum

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim 2009).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada (Rahmawati 2010).

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. (PP No. 24 Tahun 2005).

1. Jenis-Jenis Belanja Modal
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Fisik Lainnya

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuantitatif. Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data yang digunakan adalah PDRB harga konstan tahun 2000-2015 dan laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2015 yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan keuangan Daerah Kementrian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi internet dan studi dokumentasi laporan keuangan daerah yang diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan keuangan Daerah Kementrian Keuangan dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara.

Metode Analisis Data

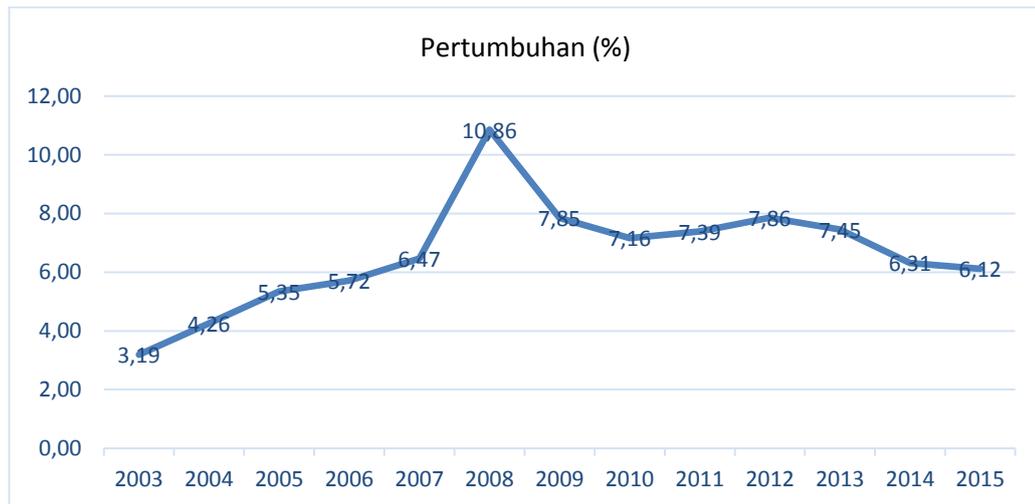
Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda dengan alat bantu software Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Analisis Diskriptif. Analisis ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang pengolahan data. Disajikan dalam bentuk narasi, grafik, dan tabel distribusi frekuensi untuk memberi gambaran mengenai Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Moda (BM) di Propinsi Sulawesi Utara

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pertumbuhan Ekonomi.

Grafik 4.1
Perkembangan laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2015

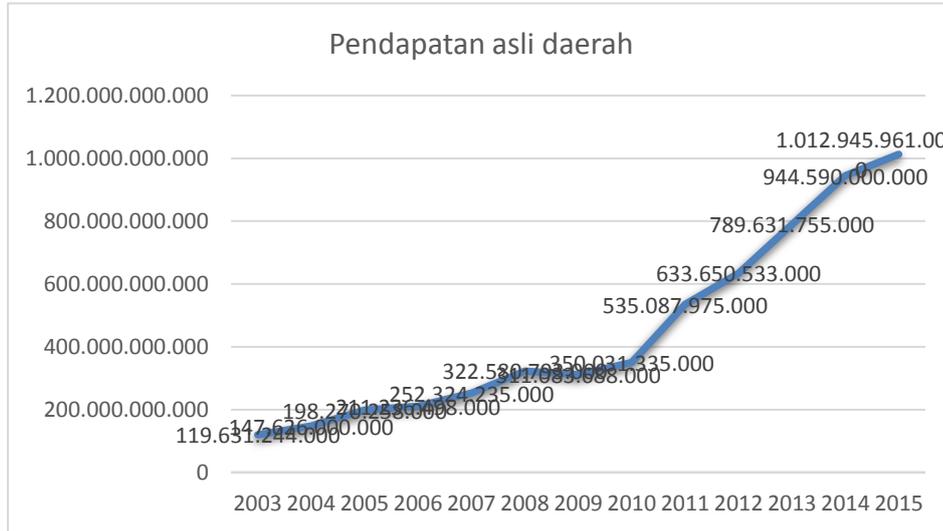


Sumber: Badan Pusat Statistik Prov Sulawesi Utara (data diolah 2017)

Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2015 terus mengalami peningkatan yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun dasar 2000. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 meningkat 10.38 dari tahun sebelumnya. Rata-rata angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara dari tahun 2003-2015 adalah 6.04%. namun demikian, angka pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang tercatat tumbuh 5,78% hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi utara masih cukup kuat dan mampu tumbuh lebih baik dibandingkan daerah di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah

Grafik
Kondisi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2003-2015

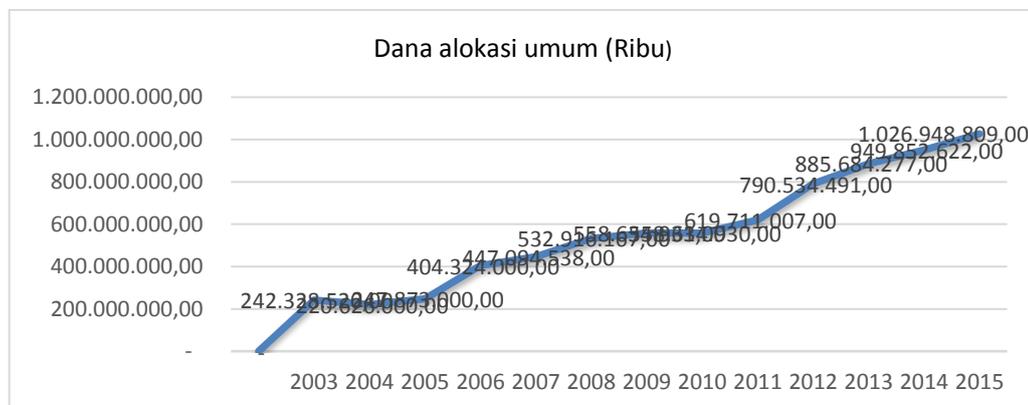


Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, data diolah 2017

Berdasarkan grafik diatas pendapatan asli daerah Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun total target pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar 944 miliar lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini menunjukkan bahwa di Propinsi Sulawesi Utara mulai beranjak untuk meningkatkan pendapatannya secara mandiri baik melalui pajak maupun retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah

Dana Alokasi Umum

Grafik 4.3
Kondisi Dana Alokasi Umum (DAU) Di Propinsi Sulawesi Utara

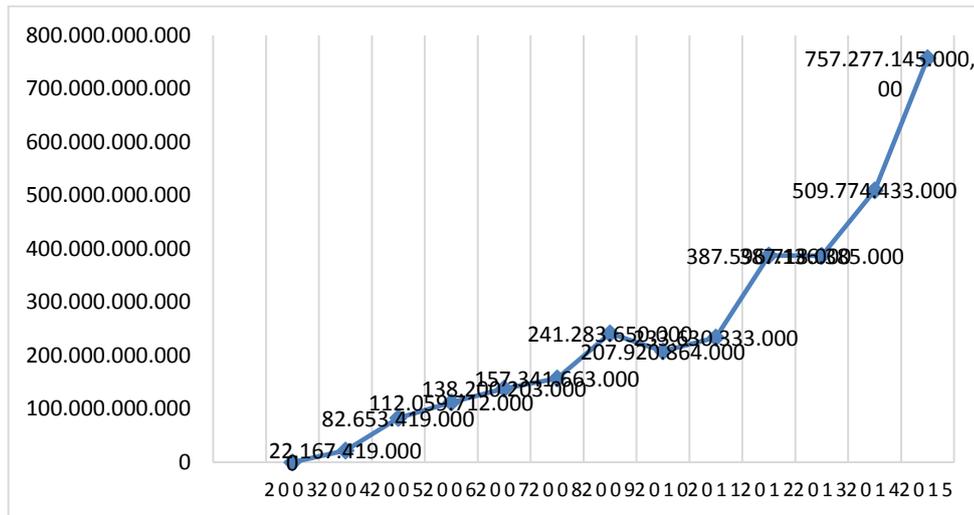


Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, data diolah 2017

Berdasarkan grafik diatas memperlihatkan pendapatan Propinsi Sulawesi Utara dari dana perimbangan terutama berasal dari dana alokasi umum dari tahun ke tahun masih cukup tinggi ini menunjukkan masih adanya ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pusat

Belanja Modal

Grafik 4.4.
Kondisi anggaran Belanja Modal Di Propinsi Sulawesi Utara



Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, data diolah 2017

Grafik diatas memperlihatkan kondisi anggaran belanja modal di propinsi sulawesi utara masih rendahnya anggaran belanja modal menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik yang dapat yang dapat multiplier effect bagi perekonomian masih relatif rendah

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan dari tahun 2003-2015 hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Propinsi Sulawesi Utara masih cukup kuat dan mampu tumbuh lebih baik.
2. Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Utara dari tahun 2003-2015 terus mengalami peningkatan hal ini menunjukkan bahwa di propinsi Sulawesi utara mulai beranjak untuk meningkatkan pendapatannya secara mandiri baik melalui pajak maupun retribusi
3. Dana Alokasi Umum propinsi Sulawesi Utara dari tahun 2003-2015 masih cukup tinggi ini menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat
4. Anggaran Belanja Modal Propinsi Sulawesi Utara dari tahun 2003-2015 masih rendah hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan untuk keperluan Belanja Modal masih cukup kecil dibandingkan dengan belanja lain

Saran

Pemerintah Daerah Sulawesi utara sebaiknya memperhatikan masalah yang berhubungan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi (PE) dan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di daerah masing-masing guna meningkatkan kemandiriannya. Sedangkan dari sisi dana perimbangan perlu manajemen dan perencanaan yang baik guna memaksimalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran pemerintah sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA**REFERENSI**

- [1] Badan Pusat Statistik Prov. Sulut. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto 2000-2015*, Katalog 9302001.71.
- [2] Boediono, 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi* No. 4. BPFE. Yogyakarta
- [3] Damang, 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>
- [4] Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, “*Data Series Keuangan Daerah*”, <http://www.djpk.depkeu.go.id> di akses tgl 03 April tahun 2017
- [5] Halim, , Abdul & Abdullah, Syukrie. 2004. “*Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali*”. *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- [6] Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat
- [7] Halim, Abdul & Abdullah, Syukrie. Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2009. “**Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi**”. *Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1)*.
- [8] Mardiasmo. 2002, “*Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah*”, Andi Offset, Yogyakarta. 2004 **Perpajakan, Andi Yokyakarta**
- [9] Mamesah, D, J., 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- [10] Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- [11] Damang, 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. Artikel. <http://www.pendapatan-asli-daerah-negara-hukum.com>
- [12] Rahmawati Nur Indah 2010, “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah*”(Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).
- [13] Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta

- [14] Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. "***Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran***": *Pendekatan Analisis Jalur. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, (Online), Vol.4, No. 2, hal, 211-228. <http://journal.ui.ac.id>, diakses 3 februari 2017):*
- [15] Undang Undng No. 32 tahun 2004 "***tentang pemerintah daerah***"
- [16] Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang "***perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah***".
- [17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 ***tentang Pengelolaan Keuangan Daerah***